

Jalan Perkembangan Demokrasi

Diunduh dari <arielheryanto.wordpress.com>

Tidak Tunggal

DEMOKRATISASI merupakan perjuangan yang dilakukan orang untuk mengembangkan mekanisme-mekanisme pengambilan keputusan secara partisipatif. Mekanisme ini diperjuangkan bersama. Secara damai hal ini diperjuangkan melalui cara referendum, pemilihan umum, kongres atau rapat anggota.

Namun semua itu harus didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang jujur dan adil. Tanpa ketentuan ini—apa pun hasilnya—tak lebih sekadar jebakan atau pelaksanaan yang manipulatif. Jika pelaksanaan proses demokrasi dijalankan secara menyimpang, maka hasilnya batal demi tegaknya kepastian hukum; jujur dan adil.

Dalam pelaksanaannya, upaya demokratisasi pastilah menemui jalan yang berliku. Dalam ide bisa saja berjalan, namun dalam sikap dan praktik tak jarang timbul perbedaan. Karena itu, agaknya perlu kita kedepankan bahwa demokratisasi yang ditandai perpecahan bagi mereka yang seide.

JALAN DEMOKRATISASI

Tentu saja, jalan menuju perkembangan demokrasi tidak tunggal. Ada banyak jalan, baik di dalam tubuh negara maupun melalui unsur-unsur masyarakat. Persoalan jalan ini memang tak sesederhana cara pandang dikotomi negara (*state*) dan "masyarakat sipil" (*civil society*).

Saya tak memandang aparat negara (*state apparatus*) sebagai kondisi yang monolitik, serba seragam. Memang secara ide bisa saja seragam, tapi yang perlu diteliti adalah praktiknya. Dalam praktik inilah yang tak selalu sama baik membendung demokratisasi atau mendorong demokratisasi.

Begini juga yang berkembang di dalam unsur-unsur masyarakat. Tidak senantisa unsur-unsur ini lebih liberal daripada di dalam unsur negara. Hal ini menunjukkan demokratisasi bukanlah sekadar persoalan dikotomi negara dan "masyarakat sipil".

Dengan demikian, potensi maupun jalan mengembangkan demokrasi tidak tunggal. jalur yang digunakan bisa saja melalui pemerintahan, birokrasi, ABRI, partai politik, parlemen, organisasi massa, universitas, media massa dan Lembaga Swadaya Masyarakat), bahkan kasus integrasi nasional.

Dalam mengembangkan demokrasi, tidaklah semua unsur yang prodemokrasi mempunyai sikap yang sama. Begitu juga sebaliknya unsur-unsur yang tak berminat dengan demokratisasi. Ada yang terlibat secara mendalam, ada yang setengah hati, dan ada juga yang terlalu bersemangat.

Yang juga tak bisa diabaikan adalah unsur yang sebenarnya konservatif namun bersuara lantang mengibarkan jargon demokrasi. Dimanakah posisinya dalam demokratisasi kadang menguntungkan dan kadang merugikan.

Namun ada satu hal yang perlu diyakini. Demokrasi adalah kehidupan "masyarakat sipil". Jika prosesnya mengarah pada sipilisasi, maka jalan menuju demokrasi mulai terbentang, melalui jalan apa pun proses ini dilakukan.

Demokratisasi—betapapun lambatnya proses tersebut—pasti mengancam kepentingan mereka yang terpelihara dalam *status quo*. Sehingga dengan segala daya, golongan ini berjuang untuk mencegah dan membendung jalur-jalur menuju demokrasi.

Perlu pula dimajukan, demokratisasi tak semata-mata membuka ruang partisipasi dalam hubungannya dengan penguasa negara, tetapi juga bertali-temali dengan berkembangnya organisasi-organisasi yang dibentuk secara demokratis.

Begitulah, demokratisasi memang bukan iihwal yang sederhana, apalagi sesempit cara pandang hitam-putih. Potensi dan geraknya harus dibaca secara teliti mengingat kompleksitas kehidupan sosial politik dari berbagai unsur yang satu dengan yang lain bergabung, bergerak mandiri atau mengambil lokasinya masing-masing.

KERETAKAN

Suatu masyarakat yang tumbuh saat ini bukanlah masyarakat yang dipersatukan di atas akar kepentingan yang sama. Karena itu aspirasi yang tumbuh pun bisa berbeda-beda sesuai kepentingan yang melekat pada masing-masing golongan. Hal ini juga yang membuka jalan yang beraneka dalam pertautannya dengan demokratisasi.

Oleh
Hendardi

Seperti telah dikemukakan, dalam unsur-unsur masyarakat ada yang membawa watak konservatif. Unsur masyarakat tak selalu lebih liberal daripada unsur negara. Dalam masyarakat berbagai unsur mengambil jalur seperti partai politik, organisasi massa, LSM, gerakan kemerdekaan, gerakan kemahasiswaan, bahkan figur-figur oposisi.

Dalam unsur-unsur masyarakat, tidaklah mereka seragam. PDI pimpinan Megawati dan NU pimpinan Abdurrahman Wahid, secara terhormat dapat dikatakan sebagai kekuatan yang secara praktis berada dalam garis memperjuangkan demokratisasi. Bahkan Abdurrahman Wahid tanpa ragu-ragu hadir sebagai figur oposisi bertalian dengan sikapnya untuk bergabung dalam Forum Demokrasi.

Adanya sikap semacam itu sudah pasti menjadikan hal yang tak mudah bagi Megawati dan Abdurrahman Wahid. Lepas dari adanya kesengajaan, PDI dan NU retak di dalam tubuhnya. Hal itu ditandai dengan munculnya "pimpinan tandingan" pada PDI dan NU. Demokratisasi yang diupayakan mereka menghadapi risiko keretakan.

Peristiwa yang berbeda muncul juga di tubuh YLBHI. Memajukan demokratisasi justru membutuhkan keretakan. Pelaksanaan yang menyimpang dari prosedur dan mekanisme hanya direduksi melalui *voting* rapat Dewan Penyayntan. Aspirasi dari bawah dibendung dalam upaya menawarkan pelaksanaan yang jujur dan adil.

Berbekal atas kasus-kasus tersebut, demokratisasi tidak disikapi secara bersama dan mematuhi kesepakatan bersama dalam kongres (PDI), muktamar (NU), dan kesepakatan lainnya yang diputuskan bersama, tentu saja melahirkan keretakan. Apalagi jika direduksi hanya sebatas orang-orang yang memiliki hak istimewa yang mengklaim sebagai lembaga tertinggi.

Mengulirkan demokratisasi tanpa sikap mendengar dan menerima desakan dari bawah, sebagai pihak mayoritas, pada gilirannya terbentur pada urusan legitimasi, karena sikap seperti ini bersifat manipulatif. Namun, sikap kritis dari bawah ini pada akhirnya melakukan gugatan demi gugatan yang justru membongkar atas apa yang selama ini dipetik.

Sikap ini memperjelas siapa yang sesungguhnya di garis demokratisasi, bukan semata karena ide atau slogan yang ditayangkan. Kejelasan sikap juga adalah sebuah keberanian politik memancangkan diri dalam gerak demokratisasi. Sikap atas pelaksanaan demokratisasi inilah yang membongkar nama ide yang palsu dan mana yang tetap teguh.

Ketika sikap-sikap itu terbongkar, maka keretakan atau disintegrasi telah dimulai, karena demokratisasi telah membuka kepentingan orang-orang yang terlibat dalam proses ini. Karena itu, keretakan tampaknya tak terhindarkan dan siapa pun yang berada di dalamnya—suka atau tidak—dipaksa untuk bersikap oleh keadaan tersebut.

* **Hendardi**, direktur Komunikasi dan Program Khusus YLBHI